



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017- 2022

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah, kami Tim Penyusun RENSTRA pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru telah menyelesaikan pekerjaan untuk menyusun Renstra tahun 2017-2022.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 untuk dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat mencapai sasaran dan target kinerja. Dan capaian itu untuk bias mewujudkan Visi Kota Pekanbaru yaitu : **“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**, serta Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yaitu : **“Menjadi Dinas Komunikasi Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”**

Demikian RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru telah tersusun. Dan tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra ini.

Pekanbaru,

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

FIRMANSYAH EKA PUTRA, ST, MT

Pembina Tk. I/ IV a
NIP. 19720131 200605 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan

 I.1 Latar Belakang 1

 I.2 Landasan Hukum 2

 I.3 Maksud dan Tujuan..... 4

 I.4 Sistematika Penulisan..... 4

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

 II.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi
 Informatika Statistik dan Persandian 6

 II.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
 Persandian 15

 II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik
 dan Persandian 21

 II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian..... 21

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Perangkat Daerah

 III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian..... 23

 III.2 Telaah Visi, MIsi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru
 23

 III.3 Telaah Renstra Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Prov Riau 25

 III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
 Strategis pada RPJMD..... 26

 III.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 28

Bab IV Tujuan dan Sasaran

 IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika
 Statistik dan Persandian..... 23

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 27

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan 27

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 27

Bab VIII Penutup 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Sebagai unsur Perangkat Daerah menjalankan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk di tingkat SKPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Renstra tersusun mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dan sekaligus untuk mendukung mewujudkan visi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya Pekanbaru Smart City yang Madani.

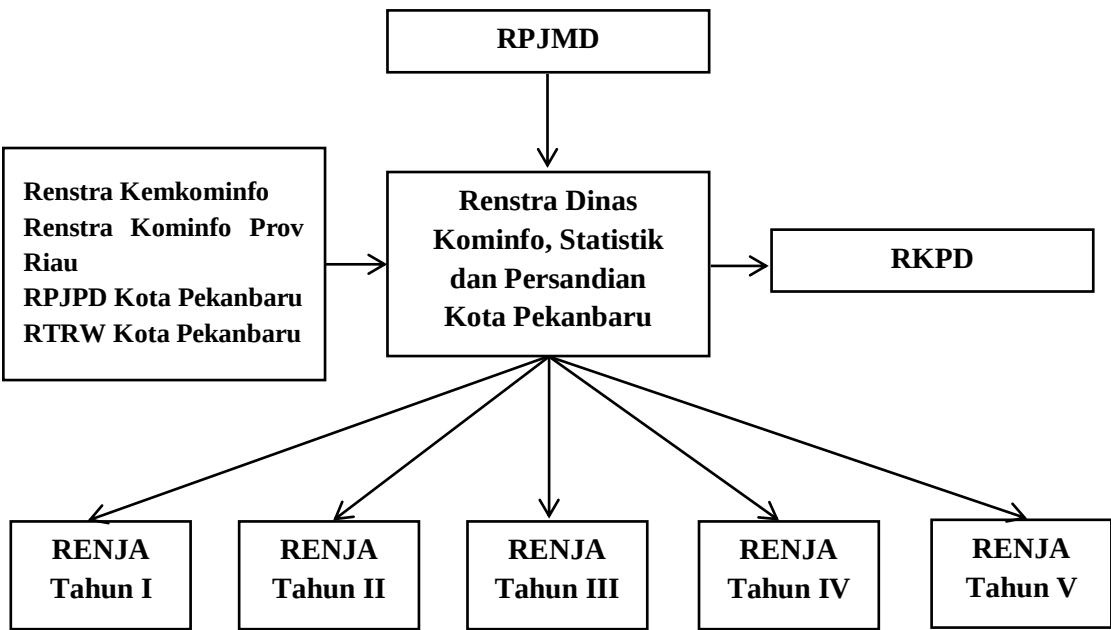
Selain itu Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Dalam Tingkat nasional juga berpedoman dan mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sedangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban Pemerintah daerah, mengatur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur DPRD dan mengatur KPUD.

Adapun keterkaitan Renstra Perangkat Daerahdengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
22. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pekanbaru adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga sasaran dapat

tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2012.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Renstra digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2. Renstra disusun untuk menjaga kesinambungan program kerja selama lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang penyusunan Renstra. Landasan Hukum yang menjadi dasar dan yang melandasi Renstra. Maksud dan Tujuan penyusunan renstra serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dan Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. Telaahan Rencana serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab ini menyajikan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.

Bab VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang mengacu atau sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat daerah yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 13 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media, pengembangan aplikasi TIK, statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan tugas pembantuan lainnya;
- b. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. perumusan dan penetapan rencana umum urusan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. perumusan peraturan dan perundang-undangan daerah serta kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- f. pengkoordinasian dan pengarahan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada dinas.
- g. pelaporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi unsur organisasi :

Kepala Dinas

- a. perumusan dan penetapan visi dan misi serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. perumusan dan penetapan rencana umum urusan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. perumusan peraturan dan perundang-undangan daerah serta kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- f. pengkoordinasian dan pengarahan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada dinas.
- g. perencanaan dan pengembangan serta pembinaan pegawai.
- h. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- i. pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- j. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- k. pelaporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sekretariat berfungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- g. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas dua sub bagian, yaitu **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan dan Program**. Sub bagian umum memiliki tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja **Sub Bagian Umum** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran,

- penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
 - h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
 - i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
 - j. perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan Dinas.
 - k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas.
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi

- a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Fisik Program Pembangunan, Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi Kinerja.
- c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- f. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- j. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
- k. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi, kemitraan informasi masyarakat dan pengembangan multi media.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi.
- b. Seksi Pengembangan Multi Media.
- c. Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat.

Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi.
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pengendalian informasi.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Multi Media dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan multi media.
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan multi media.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan multi media.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan multi media.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan informasi masyarakat untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan Statistik dan Persandian. Untuk melaksanakan tugas Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian.
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Statistik dan Persandian.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Survey dan Akuisisi Data.
- b. Seksi Pengolahan dan Analisis Data.
- c. Seksi Persandian.

Seksi Survey dan Akuisisi Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey dan akuisisi data.
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang survey dan akuisisi data.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survey dan akuisisi data.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survey dan akuisisi data.

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan dan Analisis Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis data.
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis data.
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis data.
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis data.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian.
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan e-Government dan teknologi informatika. Untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika mempunyai fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government.

- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pengembangan aplikasi dan sistem informasi dan tata kelola e-government.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Teknologi Informatika terdiri dari :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi
- c. Seksi Tata Kelola e-Government

Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi informatika.
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur teknologi informatika.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur teknologi informatika.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informatika.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

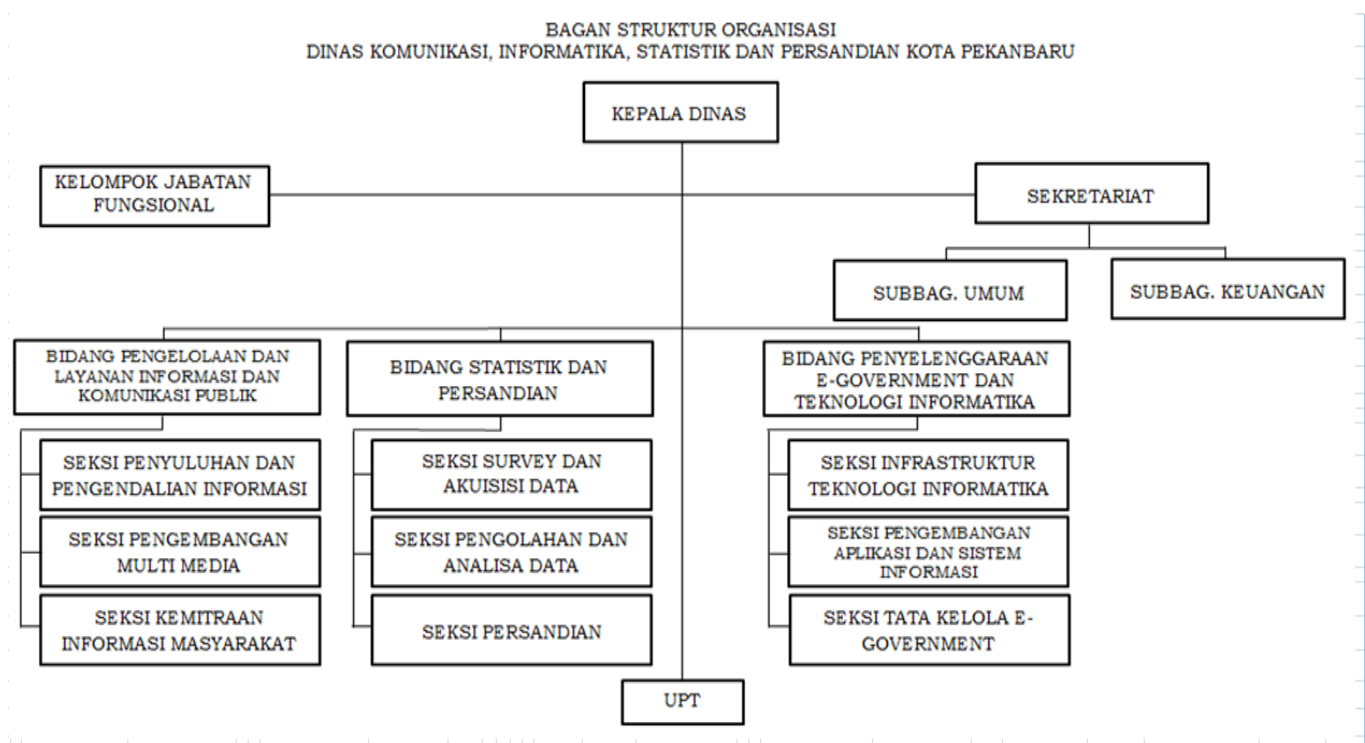
Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi.

- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi dan sistem informasi.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tata Kelola e-Government dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola e-government.
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola e-government.
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola e-Government.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola e-government.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Sumber Daya pada Perangkat Daerah, yang intern antara lain:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah. Kekuatan SDM dapat dilihat sebagai berikut dibawah ini.

Tabel. 2.2.1
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2017

NO	URAIAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SMU	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	-	2	1	1	5	-	-	8
3	Bidang Statistik dan Persandian	-	3	1	-	3	-	-	7
4	Bidang Penyelenggaraan E-Goverment	-	2	4	1	-	-	-	7
5	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	1	6	-	1	-	-	8
JUMLAH		-	8	12	2	8	1	0	31

Tabel. 2.2.2
Perangkat Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2017

NO	URAIAN	ESELON				STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	-	-	1	2	6	9
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	1	3	3	7
4	Bidang Penyelenggaraan E-Goverment	-	-	1	3	3	7
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	1	1	6	8
JUMLAH		-	-	4	9	18	31

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2.1, tingkat pendidikan karyawan Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 12 orang. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru secara umum. Jumlah karyawan Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang menamatkan pendidikan S2 cukup besar, tercatat sebanyak 8 orang. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat.

Tabel 2.2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	URAIAN	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	-	-	-
2	Sekretariat	5	4	9
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7	-	7
4	Bidang Penyelenggaraan E-Goverment	7	-	7
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	6	2	8
JUMLAH		25	6	31

Berdasarkan gender, Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru memiliki jumlah karyawan laki-laki lebih banyak yaitu 25 orang sedangkan jumlah karyawan perempuan sebanyak 6 orang. Jumlah karyawan laki-laki terbanyak pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dan Bidang Penyelenggaraan E-Government masing – masing sebanyak 7 orang. Jumlah terbanyak untuk karyawan perempuan terdapat pada bagian Sekretariat Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yakni 4 orang.

Tabel 2.2.4
Kondisi Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2017

NO	URAIAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		ASN	CPNS	
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	-	-	-
2	Sekretariat	9	-	9
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7	-	7
4	Bidang Penyelenggaraan E-Goverment	7	-	7
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	8	-	8
JUMLAH		31	-	31

Jumlah keseluruhan 31 karyawan Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

Tabel 2.2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Agama Tahun 2017

NO	URAIAN	AGAMA					JUMLAH
		Islam	Katholik	Protestan	Budha	Hindu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	9	-	-	-	-	9
3	Bidang Pengelolaan Infokom Publik	6	-	1	-	-	7
4	Bidang Penyelenggaraan E-Government	5	-	2	-	-	7
5	Bidang Layanan Kominfo	8	-	-	-	-	8
JUMLAH		28	-	3	-	-	31

Dilihat dari kondisi kepegawaian berdasarkan agama, mayoritas pegawai Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru beragama Islam.

Tabel 2.2.6
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Status Golongan/Pangkat Tahun 2017

NO	URAIAN	GOLONGAN/PANGKAT																		JLH
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	A	B	c	d	a	b	c	d	a	b	C	d	e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretariat	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	9	
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	7	
4	Bidang Penyelenggaraan E-Goverment	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-	7	
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	1	-	-	-	8	
JUMLAH		-	-	-	-	4	1	2	1	3	4	5	6	4	1	-	-	-	31	

Dilihat dari kondisi kepegawaian berdasarkan golongan/pangkat terbesar di Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru adalah golongan III berjumlah 18 orang, disusul dengan golongan IV sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 8 orang.

2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru menempati kantor yang berada di Jalan Pepaya No. 75. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 2.3.1.berikut :

Tabel 2.2.2
Jenis Sarana dan Prasarana Tahun 2017

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung		
	Ruang Kepala	1	Kondisi baik
	Ruang Sekretariat	1	Kondisi baik
	Ruang Bidang	3	Kondisi baik

	Ruang keuangan	1	Kondisi baik
	Ruang Rapat	1	Kondisi baik
	Ruang Sholat	-	Tidak Ada
	Ruang Command Centre	1	Kondisi Baik
	Toilet	2	Kurang baik
	Gudang	1	Kondisi baik
	Kantin	-	Tidak Ada
2	Kendaraan Dinas		
	Roda 4	4	Kondisi Baik
	Roda 2	-	Tidak Ada
3	Alat Kantor		
	Mesin Fotocopy	1	Kondisi Baik
	Filling besi/Metal	5	Kondisi Baik
	Lemari Kayu	3	Kondisi Baik
	Papan Nama Instansi	1	Kondisi Baik
	White Board	1	Kondisi Baik
	Alat Kantor	1	Kondisi Baik
4	Alat Rumah Tangga		
	Meja Rapat	1	Kondisi Baik
	Meja Panjang	1	Kondisi Baik
	Kursi Rapat	11	Kondisi Baik
	Kursi Tamu	2	Kondisi Baik
	Kursi Putar	13	Kondisi Baik
	Kursi Biasa	92	Kondisi Baik
	Kursi Lipat	165	Kondisi Baik
	Meja Komputer	6	Kondisi Baik
	Meja Biro	47	Kondisi Baik

	Mesin Penghisap Debu	1	Kondisi Baik
	AC Unit	8	Kondisi Baik
	AC Spli	6	Kondisi Baik
	AC Standing	2	Kondisi Baik
	Televisi	6	Kondisi Baik
	Kaca Hias	1	Kondisi Baik
	Alat Pemadam Portabel	3	Kondisi Baik
5	Peralatan Komputer		
	Local Area Network (LAN)	1	Kondisi Baik
	PC Unit / Komputer PC	21	Kondisi Baik
	Lap Top	1	Kondisi Baik
	Hard Disk	3	Kondisi Baik
	Peralatan Komputer Mainframe	1	Kondisi Baik
	Printer	9	Kondisi Baik
6	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
	Meja Kerja Pejabat Eselon	10	Kondisi Baik
	Meja Kerja Pegawai Non Struktur	8	Kondisi Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon	1	Kondisi Baik
	Kursi Kerja Pejabat Staf	12	Kondisi Baik
	Kursi susun	100	Kondisi Baik
	Kursi Sofa Tamu	1	Kondisi Baik
	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	5	Kondisi Baik
	Camera Electronic	3	Kondisi Baik
8	Alat Komunikasi		
	Pesawat Telephone	1	Kondisi Tidak Baik
	Faximile	2	Kondisi Tidak Baik

Lokasi Kantor Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang berada di tengah kota cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Jaringan komunikasi E.Gov dengan ditunjang tower 6 unit telah terhubung OPD/Bagian.
 - Web site Pemerintah Kota Pekanbaru
 - Jaringan internet

c. Sumber Daya Ekstern

1. Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
2. Sumber Daya Media massa Elektronik dan Cetak.
Diperlukan kerjasama dengan media cetak, baik surat kabar harian, mingguan maupun majalah dan tabloid yang beredar di Kota Pekanbaru.
3. Sumber Daya Media Pertunjukan Rakyat
Diperlukan kerjasama dengan sanggar-sanggar media pertunjukan rakyat yang ada di Kota Pekanbaru.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi Informatika
2. Pengembangan Aplikasi TIK
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informatika
4. Kerjasama dengan media massa baik cetak ataupun elektronik
5. Dialog interaktif dan dialog publik target
6. Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 menyampaikan beberapa Sasaran Strategis yang ada kaitannya dengan Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri,
2. Peningkatan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2014-2019 mengemukan beberapa Sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang terkait dengan program kegiatan pada Perangkat Daerah antara lain :

- a. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan media
- b. Terlaksananya pemberdayaan potensi lembaga komunikasi masyarakat
- c. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan ketrampilan bidang TIK bagi aparatur dan masyarakat.
- d. Tersedianya aplikasi pendukung e-government
- e. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dari perkembangan program kegiatan yang terlaksana pada renstra tahun 2012-2017 dan berdasarkan Renstra Kementrian dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, maka Tantangan dan Peluang adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
 - Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
 - Lemahnya jaringan informasi
 - Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi
 - Adaptasi perkembangan TIK lambat

2. Peluang

- Semakin maju dan berkembangnya TIK
- Adanya berbagai ragam media informasi
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
- Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat

Pengembangan pelayanan informasi Perangkat Daerah akan ditingkatkan dengan pembentukan PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Pemerintahan Kota Pekanbaru dan akan disosialisasikan untuk adanya PPID di setiap SKPD. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi akan disusun SOP (Standar Operasional Prosedur).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatannya Perangkat Daerah menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk teratasi, permasalahan itu antara lain:

- Penerapan *e-government* dalam menunjang Reformasi Birokrasi belum optimal.
- Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
- Belum tersedianya sistem informasi layanan yang saling terkoneksi antar OPD
- Terkait indikator jumlah aplikasi *e-government* dilingkup pemerintah kota, jumlahnya sebesar 10% karena aplikasi tersebut baru diterapkan pada tahun 2015. Upaya peningkatan persentase aplikasi *e-government* perlu dilakukan pada tahun-tahun berikutnya supaya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi
- Masih kurangnya fasilitas jaringan informasi bagi publik pada area public
- Pada indicator persentase jumlah nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain yang terkelola dengan baik dengan informasi yang *up-to-date* capaiannya masih rendah, hanya sekitar 50% domain dan subdomain yang terkelola dengan baik. Tentunya perlu ada perbaikan manajemen dalam pengelolaan domain dan subdomain yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru.
- Rendahnya proporsi pengguna internet.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru sebagai visi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”

Penjelasan dari terminologi Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: *Smart City*, adalah: Terjemahannya adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. *Smart City* ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu *Smart Government* (pemerintahan pintar), *Smart*

Economy (ekonomi pintar), *Smart Mobility* (mobilitas pintar), *Smart People* (masyarakat pintar), *Smart Living* (lingkungan pintar), dan *Smart Live* (Hidup pintar).

Madani, adalah: Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Misi Pemerintah Kota Pekanbaru adalah :

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3)
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City)

Telaah Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, sebagai berikut :

Perangkat Daerah terkait dengan Misi (1) dan (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi dengan mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai

Program Walikota dan Wakil Walikota tersaji dalam RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 antara lain yang terkait dengan program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, sebagai berikut:

Tabel 3.
Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Utama
	MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik	
	Tujuan 5 Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas	
	Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Antar Instansi Dan Lembaga Lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru.
		Persentase Permintaan Informasi Publik Yang Ditinjau Lanjuti.
	Program 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Meningkatnya Jumlah Website OPD yang terintegrasi dengan Portal Pekanbaru
	Program 2. Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Jumlah advertorial yang diterbitkan melalui kemitraan media cetak dan elektronik
	Sasaran : Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah.

Tabel 3. Perubahan
Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Utama
	MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik	
	Tujuan 5 Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas	
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance & Clean Governance)	Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)
	Program 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap penyampaian informasi dan komunikasi yang sampai ke masyarakat

	Program 3. Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Aplikasi Informatika Dalam Rangka Mewujudkan Kota Cerdas
	Program 4. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase meningkatnya sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah
	Program 5. Program Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Sektoral

3.3 Telaah Renstra Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi Riau

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Berpengetahuan, Mandiri, Dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Pemanfaatan TIK Berkarakter Indonesia”.

- Misi :**
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan;
 2. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari ketujuh Misi tersebut adanya keterkaitan dengan Perangkat Daerah pada misi (1), (2), (4) dan (5). Selain itu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah di keluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal dan Saing”.

Misi :

1. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan.
2. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab. .

Dari ketiga misi tersebut ada keterkaitan dengan misi Perangkat Daerah dan juga keterkaitan dengan program kegiatan, seperti Pembinaan dan Pengembangan KIM, PPID dan khususnya peningkatan infrastruktur teknologi serta pengembangan e-Government.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah :

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”

RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari pembangunan jangka daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan RPJMD ke-2 dimana Visi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah: *“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani.”*

RPJMD ke-3 (2017-2022) ini ditujukan untuk memenuhi Tema pembangunan tahap lima tahun ke-3 (2016-2020) dari RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025, yaitu:

“Penataan Kota dan penyediaan infrastruktur yang memadai guna menunjang pengembangan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu, didukung dengan pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia”

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai berikut: “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”

Penjelasan dari terminologi Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: **Smart City**, adalah:

Terjemahannya adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. Smart City ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu Smart Government (pemerintahan pintar), Smart Economy (ekonomi pintar), Smart Mobility (mobilitas pintar), Smart People (masyarakat pintar), Smart Living (lingkungan pintar), dan Smart Live (Hidup pintar).

Madani, adalah:

Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu

3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat impact dan atau outcome, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih tepat guna pencapaian misi kepada daerah. Sesuai amanat Undang undang 23 tahun 2014 dimana RPJMD harus berpedoman kepada RPJMN maka terkait berbagai Agenda Prioritas dan Kebijakan Pembangunan nasional beserta sasaran kewilayahan yang ditetapkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari gambaran pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta sasaran pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sasaran pada Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, maka isu-isu strategis dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Isu-Isu Strategis

Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
Globalisasi Arus Informasi	Diberlakukannya penggunaan Tower/menara bersama oleh operator seluler	Website SKPD/Instansi pemerintah harus menggunakan alamat go.id
		Sebagian masyarakat sudah memanfaatkan internet dalam berbagai hal
		Sebagian masyarakat yang tidak/belum memanfaatkan internet dapat memakai media informasi dan komunikasi konvensional, seperti KIM, Dialog dan PPID
		Dengan semakin majunya TIK belum diimbangi dengan SDM yang berkembang di masyarakat
		Sarana dan prasarana yang belum memadai baik segi jumlah maupun teknologinya
		Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan merupakan uraian dari misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut :

TABEL 4.1
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Tata Kelola Cerdas Berbasis LayananTeknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Persentase pemanfaatan layanan public administrative berbasis TIK	35%	45%	65%	80%	85%
		Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Indeks Pengamanan Informasi	35%	55%	70%	83%	90%
		Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	45%	55%	75%	85%	90%
2		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	IKM OPD (Nilai Komponen E-government Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)/Nilai Reformasi Birokrasi OPD	100%	75%	80%	90%	95%
			Nilai Evaluasi AKIP OPD	C	B	BB	A	A

TABEL 4.1
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFOMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA
PEKANBARU

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR SASARAN P-RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun 2022
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan Tata Kelola Cerdas Berbasis LayananTeknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance & Clean Government)	Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	persentase layanan masyarakat yang berbasis SPBE dan Non SPBE	40	50	60	80	100	Terpenuhinya Layanan masyarakat yang berbasis SPBE ataupun non SPBE
2		Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).		Persentase pemanfaatan layanan public administrative berbasis TIK	35%	45%	65%	80%	85%	Aplikasi layanan masyarakat yang berbasis TIK
		Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase Indeks Pengamanan Informasi	35%	55%	70%	83%	90%	Terkelolanya keamanan informasi daerah
		Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral		Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	45%	55%	75%	85%	90%	terkumpulnya data statistik sektoral
3		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		IKM OPD (Nilai Komponen E-government Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)/Nilai Reformasi Birokrasi OPD	100%	75%	80%	90%	95%	Nilai IKM A
				Nilai Evaluasi AKIP OPD	C	B	BB	A	A	Nilai AKIP A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

- Visi : Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani
- Misi : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik

TABEL 5

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Cerdas Berbasis LayananTeknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Peningkatan Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru	
	Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
	Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral	
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Peningkatan Reformasi Birokrasi (RB)di lingkungan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru	
		Nilai Evaluasi AKIP OPD	

TABEL 5 PERUBAHAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Cerdas Berbasis LayananTeknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang terintegrasi dan Transparan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	1. Pengembangan system Informasi pelayanan publik yang terintegrasi antar OPD melalui aplikasi – aplikasi yang mendukung kinerja. 2. Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah 3. Rekrutmen tenaga ahli yang memiliki sertifikasi IT	1. Sistem Infromasi terpadu dan jaringan internet terintegrasi antar OPD 2. Pengembangan infrastruktur teknologi yang terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah 3. Rekrutmen tenaga ahli IT
		Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1. Sosialisasi penggunaan tanda tangan elektornik 2. Bimtek tentang pengamanan informasi	1. Perwako Penerapan Tanda Tangan Elektronik 2. melakukan Bimtek Pengamanan Informasi secara berkala
		Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral	1. Sosialisasi kebutuhan data statistic sectoral 2. Peningkatan SDM statistic sektoral	1.Penguatan Kelembagaan statistic sektoral 2.Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data statistic sectoral secara berkala 3.Bimtek statistic sektoral bagi ASN di lingkup Pemerintah daerah
2		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Menerapkan teknologi informasi dalam penerapan disiplin aparatur negara 2. Bimtek ASN untuk meningkatkan kualitas kinerja	1. Memberikan reward dan punishment dalam penegakan disiplin ASN 2. Bimtek ASN secara berkala
			1. Memperbaiki kualitas dokumen perencanaan 2. Penyampain laporan kinerja	1. Mensinkronisasikan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan 2. Penyampaian laporan kinerja tepat waktu

BAB VI
RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

TABEL 6.1

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra dan Renja.

PROGRAM	Indikator Program	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kerja Pada Akhir RPJMD	
		Target	RKPD 2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	Rp 1.780.968.165	75%	Rp 2.274.500.000	80%	Rp 2.426.500.000	90%	Rp 2.600.500.000	95%	Rp 2.800.500.000	100%	Rp 11.882.968.165
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan materai dan benda pos lainnya	100%	Rp 4.500.000	75%	Rp 4.500.000	80%	Rp 4.500.000	90%	Rp 4.500.000	95%	Rp 4.500.000	100%	Rp 22.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya perangkat komunikasi dan sumber daya air serta listrik	100%	Rp 129.600.000	75%	Rp 150.000.000	80%	Rp 165.000.000	90%	Rp 180.000.000	95%	Rp 200.000.000	100%	Rp 824.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	Rp 121.987.648	75%	Rp 150.000.000	80%	Rp 175.000.000	90%	Rp 200.000.000	95%	Rp 250.000.000	100%	Rp 896.987.648
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	100%	Rp 247.676.196	75%	Rp 300.000.000	80%	Rp 320.000.000	90%	Rp 350.000.000	95%	Rp 375.000.000	100%	Rp 1.592.676.196

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terjaganya peralatan kantor	100%	Rp 12.200.000	75%	Rp 15.000.000	80%	Rp 20.000.000	90%	Rp 22.000.000	95%	Rp 25.000.000	100%	Rp 94.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	Rp 125.050.500	75%	Rp 150.000.000	80%	Rp 175.000.000	90%	Rp 200.000.000	95%	Rp 225.000.000	100%	Rp 875.050.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang hasil cetakan dan penggandaan	100%	Rp 68.880.200	75%	Rp 75.000.000	80%	Rp 80.000.000	90%	Rp 100.000.000	95%	Rp 120.000.000	100%	Rp 443.880.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	Rp 16.323.000	75%	Rp 20.000.000	80%	Rp 25.000.000	90%	Rp 30.000.000	95%	Rp 35.000.000	100%	Rp 126.323.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	100%	Rp 8.640.000	75%	Rp 10.000.000	80%	Rp 12.000.000	90%	Rp 14.000.000	95%	Rp 16.000.000	100%	Rp 60.640.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	100%	Rp 155.872.500	75%	Rp 200.000.000	80%	Rp 250.000.000	90%	Rp 300.000.000	95%	Rp 350.000.000	100%	Rp 1.255.872.500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Rp 890.238.121	75%	Rp 1.200.000.000	80%	Rp 1.200.000.000	90%	Rp 1.200.000.000	95%	Rp 1.200.000.000	100%	Rp 5.690.238.121
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	100%	Rp 1.401.026.429	85%	Rp 215.312.500	0%	Rp 236.843.750	0%		0%		100%	Rp 1.853.182.679
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	-	Rp -		Rp -
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor	100%	Rp 1.401.026.429	85%	Rp 215.312.500	87%	Rp 236.843.750	90%		95%		100%	Rp 1.853.182.679
Pengadaan Meubeleur	-		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	0%	Rp -	75%	Rp 45.000.000	80%	Rp 55.000.000	90%	Rp 60.000.000	100%	Rp 75.000.000	100%	Rp 235.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas pegawai	0%	Rp -	75%	Rp 45.000.000	80%	Rp 55.000.000	90%	Rp 60.000.000	100%	Rp 75.000.000	100%	Rp 235.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	35%	Rp 54.654.600	45%	Rp 65.000.000	65%	Rp 75.000.000	75%	Rp 90.000.000	90%	Rp 110.000.000	100%	Rp 394.654.600
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek Meningkatkan Kemampuannya	35%	Rp 54.654.600	45%	Rp 65.000.000	65%	Rp 75.000.000	75%	Rp 90.000.000	90%	Rp 110.000.000	100%	Rp 394.654.600
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip SKPD	C	Rp 11.460.700	B	Rp 15.000.000	BB	Rp 17.600.000	A	Rp 19.800.000	A	Rp 22.000.000	A	Rp 85.860.700
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data dan buku Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	C	Rp 3.459.000	B	Rp 5.000.000	BB	Rp 5.600.000	A	Rp 5.800.000	A	Rp 6.000.000	A	Rp 25.859.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan semesteran dan diketahui anggaran yang terealisasi	C	Rp 4.160.900	B	Rp 5.000.000	BB	Rp 6.000.000	A	Rp 7.000.000	A	Rp 8.000.000	A	Rp 30.160.900
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan diketahuinya	C	Rp 3.840.800	B	Rp 5.000.000	BB	Rp 6.000.000	A	Rp 7.000.000	A	Rp 8.000.000	A	Rp 29.840.800

	anggaran yang terealisasi												
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Meningkatnya Jumlah Website OPD yang terintegrasi dengan Portal Pekanbaru	35%	Rp 14.442.745.448	45%	Rp 32.005.000.000	65%	Rp 33.160.750.000	80%	Rp 35.232.687.500	85%	Rp 36.967.125.000	100%	Rp 151.808.307.948
Pembinaan dan pengembangan jaringan kominfo	Terbinanya system jaringan Komunikasi dan Informasi	35%	Rp 2.158.045.922	45%	Rp 28.000.000.000	65%	Rp 28.555.750.000	80%	Rp 29.977.687.500	85%	Rp 31.162.125.000	100%	Rp 119.853.608.422
Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Terbinanya Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	35%	Rp 12.126.824.396	45%	Rp 28.000.000.000	65%	Rp 28.555.750.000	80%	Rp 29.977.687.500	85%	Rp 31.162.125.000	100%	Rp 129.822.386.896
Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	35%	Rp -	45%	Rp 2.915.000.000	65%	Rp 3.075.000.000	80%	Rp 3.285.000.000	85%	Rp 3.395.000.000	100%	Rp 12.670.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	35%	Rp 157.875.130	45%	Rp 230.000.000	65%	Rp 260.000.000	80%	Rp 290.000.000	85%	Rp 320.000.000	100%	Rp 1.257.875.130
Pengembangan Komunikasi Berbasis Multimedia	Tersedianya Media Komunikasi Berbasis Multimedia	35%	Rp -	45%	Rp 860.000.000	65%	Rp 1.270.000.000	80%	Rp 1.680.000.000	85%	Rp 2.090.000.000	100%	Rp 5.900.000.000
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Jumlah advertorial yang diterbitkan melalui kemitraan media cetak dan elektronik	65%	Rp 9.844.763.854	70%	Rp 7.665.000.000	80%	Rp 7.100.000.000	85%	Rp 9.557.000.000	90%	Rp 9.380.000.000	100%	Rp 43.546.763.854
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	65%	Rp 9.373.240.810	70%	Rp 6.155.000.000	80%	Rp 4.000.000.000	85%	Rp 4.867.000.000	90%	Rp 4.000.000.000	100%	Rp 27.995.240.810
Pembinaan Masyarakat Bidang Komunikasi Informasi	Terfasilitasinya Kebutuhan Masyarakat	65%	Rp -	70%	Rp 510.000.000	80%	Rp 510.000.000	85%	Rp 510.000.000	90%	Rp 510.000.000	100%	Rp 2.040.000.000

	Akan Komunikasi dan Informasi												
Pengelolaan Website	Terkelolanya Informasi Daerah melalui website pekanbaru.go.id	65%	Rp 453.291.298	70%	Rp 300.000.000	80%	Rp 300.000.000	85%	Rp 300.000.000	90%	Rp 300.000.000	100%	Rp 1.653.291.298
Pengelolaan Majalah Bertuah	Terkelolanya informasi daerah melalui majalah bertuah	65%	Rp 281.127.658	70%	Rp 350.000.000	80%	Rp 400.000.000	85%	Rp 450.000.000	90%	Rp 500.000.000	100%	Rp 1.981.127.658
Pengelolaan PPID	Terkelolanya PPID dengan baik	65%	Rp 71.649.534	70%	Rp 210.000.000	80%	Rp 230.000.000	85%	Rp 250.000.000	90%	Rp 270.000.000	100%	Rp 1.031.649.534
Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Tersampainya Opini dan Aspirasi Publik Melalui Website dan Pendukung Lainnya	65%	Rp 65.454.554	70%	Rp 140.000.000	80%	Rp 160.000.000	85%	Rp 180.000.000	90%	Rp 200.000.000	100%	Rp 745.454.554
Pengelolaan Televisi Madani	TV Madani	65%		70%		80%		85%	Rp 1.500.000.000	90%	Rp 1.800.000.000	100%	Rp 3.300.000.000
Pengelolaan Radio Madani	Radio Madani	65%		70%		80%	Rp 1.500.000.000	85%	Rp 1.500.000.000	90%	Rp 1.800.000.000	100%	Rp 4.800.000.000
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	Meningkatnya sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah	35%	Rp 86.134.606	55%	Rp 650.000.000	70%	Rp 650.000.000	83%	Rp 800.000.000	90%	Rp 800.000.000	100%	Rp 2.986.134.606
Pengembangan Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian	Terkelolanya Basis Data Informasi Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian	35%	Rp 86.134.606	-	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 86.134.606
Pengembangan Sistem Persandian dan Keamanan Informasi	Terkelolanya Sistem Persandian dan Keamanan Informasi	35%	Rp -	55%	Rp 650.000.000	70%	Rp 650.000.000	83%	Rp 800.000.000	90%	Rp 800.000.000	100%	Rp 2.986.134.606

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Jumlah data sektoral yang tersedia, up to date (6 bulan terakhir)	45%	Rp 868.682.942	55%	Rp 700.000.000	75%	Rp 588.156.250	85%	Rp 700.000.000	90%	Rp 725.000.000	100%	Rp 2.987.425.400
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terkumpulnya dan tersusunnya data statistik daerah	45%	Rp 594.413.792	55%	Rp 400.000.000	75%	Rp 278.156.250	85%	Rp 350.000.000	90%	Rp 325.000.000	100%	Rp 1.353.156.250
Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik	Terlaksananya Pengolahan, Updating dan Analisa Data Statistik Daerah	45%	Rp 274.269.150	55%	Rp 300.000.000	75%	Rp 310.000.000	85%	Rp 350.000.000	90%	Rp 400.000.000	100%	Rp 1.634.269.150
			Rp 28.890.436.744		Rp 43.634.812.500		Rp 44.309.850.000		Rp 49.059.987.500		Rp 50.879.625.000		Rp 215.780.297.952

**TABEL 6.1. Perubahan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU**

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
		2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2022
		TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah							100%	4.060.666.000	100%	4.645.614.600	100%
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun		NA		NA		NA	100%	10.500.000	100%	14.000.000	100%
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra /Renja Perangkat Daerah		NA		NA		NA	2 Dokumen	5.500.000,00	3 Dokumen	7.000.000	Dokumen
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		NA		NA		NA	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000	Dokumen money triwulan
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase administrasi kinerja dan keuangan		NA		NA		NA	100%	19.800.000	100%	22.000.000	100%

	yang dilaksanakan											
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		NA		NA		NA	4 dokumen	5.800.000	4 Laporan	6.000.000	Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan keuangan semesteran yang disusun		NA		NA		NA	2 dokumen	7.000.000	2 Laporan	8.000.000	Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun		NA		NA		NA	1 dokumen	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	Laporan
Kegiatan Administrasi Umum	Persentase administrasi umum yang dilayani		1.780.968.165		1.810.093.253		2.259.757.589	100%	3.835.366.000	100%	4.379.614.600	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	22.900 surat keluar, surat masuk, dokumen kontrak	4.500.000	22.900 surat keluar, surat masuk, dokumen kontrak	4.500.000	22.900 surat keluar, surat masuk, dokumen kontrak	4.500.000	60 koli	4.500.000	75 koli	4.500.000	Jasa pengiriman surat dan dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	12 Bulan	129.600.000	12 Bulan	129.600.000	12 Bulan	164.400.000	3 rekening	180.000.000	3 rekening	200.000.000	rekening yang dibayarkan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	121.987.648	4 Unit	228.718.800	4 Unit	124.370.000	4 unit	200.000.000	4 unit	210.000.000	jumlah unit kendaraan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bidang yang dilayani kebersihannya	12 Bulan	247.676.196	12 Bulan	239.787.988	12 Bulan	333.629.372	6 bidang	350.000.000	6 bidang	365.000.000	Jumlah ruangan bidang yang dilayani kebersihannya
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor/Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	12.200.000	12 Bulan	21.100.000	12 Bulan	19.100.000	34 unit	22.000.000	34 unit	24.000.000	Jumlah unit peralatan yang diperbaiki
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	40 Jenis	125.050.500	40 Jenis	71.879.700	40 Jenis	172.527.400	65 Jenis	162.000.000	65 Jenis	180.000.000	Jenis ATK yang dibelanjakan (ATK, Perangko, materai dan benda pos lainnya)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan yang disediakan	13 Jenis cetakan	68.880.200	13 Jenis cetakan	115.635.465	13 Jenis cetakan	67.080.615	18 Jenis	84.500.000	18 Jenis	100.000.000	Jenis barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	12 Bulan	16.323.000	12 Bulan	41.391.000	12 Bulan	16.323.000	15 Jenis	27.000.000	15 Jenis	30.000.000	Jenis belanja komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bola lampu, kabel, sakelar dll)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Exlr	8.640.000	2 Exlr	8.640.000	2 Exlr	8.640.000	4 eks	10.000.000	4 eks	16.000.000	eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah pack yang disediakan	12 Bulan	16.323.000	12 Bulan	41.391.000	12 Bulan	16.323.000	2.500 pack	255.000.000	3.000 pack	330.000.000	jumlah pack makanan dan minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi program	2 Exlr	8.640.000	2 Exlr	8.640.000	2 Exlr	8.640.000	150 Kali	1.095.000.000	170 Kali	1.170.114.600	1 kali (paket sppd pergi-pulang)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	9.020 nasi kotak, snack	155.872.500	9.020 nasi kotak, snack	198.840.300	9.020 nasi kotak, snack	249.187.200	2 unit	500.000.000	2 unit	650.000.000	Jumlah unit kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	12 Bulan	890.238.121	12 Bulan	750.000.000	12 Bulan	1.100.000.000	10 unit	945.366.000	12 unit	1.100.000.000	Jumlah unit peralatan gedung kantor
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya							50 %	195.000.000	50 %	230.000.000	100%
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/kartu Absensi yang diadakan		1.401.026.429		7.931.340.656		2.751.493.500	3 unit	15.000.000	4 unit	20.000.000	Jumlah unit mesin absensi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	- -	-	0 -	-	0 -	-	35 stel	50.000.000	35 stel	60.000.000	Jumlah stel pakaian dinas ASN -

Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	10 jenis	1.401.026.429	10 jenis	7.931.340.656	10 jenis	2.751.493.500	35 stel	50.000.000	35 stel	60.000.000	Jumlah stel pakaian dinas ASN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	0 -	-	0 -	-	0 -	-	15 orang	80.000.000	15 orang	90.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek -
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap penyampaian informasi dan komunikasi yang sampai ke masyarakat		14.442.745.448		7.374.975.501		12.116.883.460	45 %	18.578.092.000	50 %	18.726.058.900	Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur terhadap layanan pengelolaan informasi dan komunikasi tentang Pemerintah Daerah
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kot a		NA					1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	Tercapainya kebijakan teknis bidang informasi (peraturan walikota dll)
Perumusan Kebijakan teknis bidang informasi	Jumlah kegiatan Peraturan Wali kota (PPID, KIM, Media Center, Media		NA					1 Kegiatan	1.300.000.000	1 Kegiatan	1.300.000.000	Terkelolanya monitoring dan respon masyarakat serta aspirasi publik

	Luar Ruang, E-Lapor SP4N!)											terhadap isu dan pengaduan publik
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah kegiatan Sistem Monitoring dan Respon terhadap Isu dan pengaduan Publik ' (1. Klipping Digital Media : a. Klipping Koran b. Pengadaan Scanner c. Pengadaan Aplikasi d. Operator Membuat Formulir Pendapat Umum (Polling) 1. Lapor SP4N (E-Lapor) 2. Contact Center 3. Call Center)		NA					1 Kegiatan	450.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	Terwujudnya monitoring kegiatan terhadap kebijakan pemerintah
Monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pencitraan Positif Terhadap Kebijakan Pemerintah (Output :		NA					1 Kegiatan	1.450.000.000	1 Kegiatan	1.450.000.000	Terkelolanya kegiatan terhadap konten-konten untuk media publik

	Database dan Rekomendasi)											
Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan Konten2 Untuk Media Publik (Out Put :Pembuatan Konten Video/Film, Leaflet, Booklet, Kalender)		NA					1 Kegiatan	13.500.000.000	1 Kegiatan	13.500.000.000	Terkelolanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan media komunikasi publik
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan Tersosialisasin ya Kinerja Pemerintah kepada Masyarakat (Pengelolaan Website www.pekanbaru.go.id, Majalah Bertuah, kerjasama penerbitan advetorial, kerjasama media cetak dan elektronik, Media Luar Ruang)		NA					1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	Terkelolanya pelayanan informasi publik secara optimal

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatanTerkelolanya PPID (Jumlah permohonan yang masuk dan yang terselesaikan)		NA					1 Kegiatan	550.000.000	1 Kegiatan	550.000.000	Terkelolanya pelayanan hubungan media-media melalui media center
Layanan Hubungan Media	Jumlah kegiatan mewujudkan Pengelolaan Media Center (Siaran Pers, konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan liputan media)		NA					1 Kegiatan	550.000.000	1 Kegiatan	550.000.000	Terkelolanya KIM (kelompok informasi masyarakat) dengan baik
Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah kegiatan peningkatan Informasi 2 arah antara Pemerintah dan Masyarakat (Kelompok Informasi Masyarakat)		NA					1 Kegiatan	278.092.000	1 100%	326.058.900	Tercapainya sumber daya yang berkompeten

Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah kegiatan Sumber Daya Kompeten (Mengadakan dan Mengikuti Bimtek)		NA					40 %	35.058.729.800	40 %	35.386.100.000	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan dan kenyamanan penggunaan Aplikasi untuk mewujudkan Kota Cerdas
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Aplikasi Informatika Dalam Rangka Mewujudkan Kota Cerdas							45 %	8.379.207.758	45 %	8.379.207.758	Tercapainya domain untuk mendukung mewujudkan kota cerdas
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pengelolaan nama domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		NA		NA		NA	35 %	8.379.207.758	40 %	8.379.207.758,00	Tersedianya jaringan lokal antar intra OPD
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jaringan lokal tertutup antar OPD Pemerintah		NA		NA		NA	100%	26.679.522.042	100%	27.006.892.242	Indeks kepuasan masyarakat /aparatur terhadap pelayanan dan kenyamanan Pemanfaatan Teknologi

	Daerah yang aman											Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara nPemerintahan
PENGELOLAA N E- GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelayanan dan kenyamanan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara an Pemerintahan				NA		NA	40 %	400.000.000	40 %	400.000.000	Peningkatan pelaksanaan SPBE
Penatalaksanaa n dan Pengawasan e- government	Persentase pelaksanaan SPBE		NA		NA		NA	40 %	200.000.000	40 %	150.000.000	Terwujudnya sinkronisasi pengelolaan Rencana induk

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi												dan anggaran yang berbasis elektronik
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		NA		NA		NA	40 %	17.515.910.404	40 %	17.313.280.604	Infrastruktur pengelolaan pusat data pemerintah daerah
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen Infrastruktur Dasar Pusat Data Pemerintah Daerah		NA		NA		NA	40 %	6.068.811.638	40 %	6.068.811.638	Terkelolanya bandwidth internet untuk OPD tercapai
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Bandwith Internet Domestik dan Internasional untuk Seluruh OPD di Pemerintahan Daerah		NA		NA		NA	40 %	50.000.000	45 %	50.000.000	Peningkatan kerjasama dalam sistem keamanan informasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase kerjasama dalam sistem keamanan informasi		NA		NA		NA	33 %	50.000.000	45 %	50.000.000	Pengelolaan sinkronisasi data dan informasi elektronik dengan baik
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase pengelolaan dengan baik dan aman sinkronisasi data dan informasi elektronik		NA		NA		NA	43 %	648.680.000	55 %	648.680.000	Tersedianya aplikasi yang up to date
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase penyediaan aplikasi yg up to date		NA		NA		NA	30 %	-	45 %	580.000.000	Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah dengan baik
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		NA				NA	40 %	1.096.120.000	40 %	1.096.120.000	Terkelolanya fasilitas command center dan call center 112 dengan baik dan lancar
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas Terkelolanya Fasilitas Command		NA		NA		NA	35 %	600.000.000	50 %	600.000.000	Tersedianya sumber daya yang memadai untuk teknologi informasi dan komunikasi

	Center dan Call Center 112											pemerintah daerah
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		NA		NA		NA	20 %	50.000.000	25 %	50.000.000	Terkelolanya GCIO
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase peningkatan pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		NA		NA		NA	35 %	2.998.338.400	35 %	3.249.531.000	
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERSANDIAN	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pekanbaru yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik daerah		NA		NA		NA	35 %	2.998.338.400	40 %	3.249.531.000	%
Program Persandian Untuk	Persentase meningkatnya sistem pengamanan informasi		NA		NA		NA	35 %	2.421.882.000	40 %	2.612.562.500	%

Pengamanan Informasi	Pemerintah Daerah											
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah		NA		NA		NA	35 %	768.608.000,00	40 %	801.656.800	Sumber daya sandi yang berkualitas
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Analisis Kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan antar instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		NA		NA		NA	40 %	1.653.274.000,00	40 %	1.810.905.700	kualitas keamanan informasi yang berbasis elektronik dan non elektronik
Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non elektronik	Persentase keamanan informasi yang berbasis elektronik dan non elektronik		NA		NA		NA	35 %	576.456.400	35 %	636.968.500	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD		NA		NA		NA	35 %	576.456.400,00	45 %	636.968.500	Jaringan sandi antar OPD yang lancar dan aman

Kabupaten/Kota												
Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan operasional jaringan sandi antar OPD		NA		NA		NA	40 %	992.925.000	55 %	1.105.170.000	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah		NA		NA		NA	40 %	992.925.000	55 %	1.105.170.000	%
Program Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Sektoral		NA		NA		NA	40 %	992.925.000	55 %	1.105.170.000	%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota		NA		NA		NA	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen pengumpulan Data Statistik Sektoral Kota Pekanbaru dari Seluruh OPD		NA		NA		NA	150 Orang	200.000.000	150 Orang	225.000.000	Terkumpulnya data statistik sektoral antar OPD

Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM dalam peningkatan Bidang Statistik Sektoral		NA		NA		NA	40 %	200.000.000	40 %	210.000.000	Terwujudnya SDM yang memadai
Membangun Metadata Sektoral	Persentase Data Sektoral yang memiliki Metadata		NA		NA		NA	40 %	112.925.000	40 %	115.000.000	Terwujudnya metadata sektoral
Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan Pelayanan Kelembagaan Statistik Sektoral		NA		NA		NA	30 %	100.000.000	30 %	110.170.000	Peningkatan layanan kelembagaan statistik sektoral
Pengembangan Infrastruktur	Persentase untuk mengembangkan Infrastruktur Statistik Sektoral		NA		NA		NA	50 %	80.000.000	50 %	95.000.000	Infrastruktur data statistik sektoral yang memadai
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase melakukan otorisasi statistik sektoral yang ada di daerah		NA		NA		NA	45 %	18.578.092.000	50 %	18.726.058.900	Mengoptimalkan otorisasi statistik sektoral di daerah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir JMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	Target
1	Persentase OPD Dengan IKM "Sangat Baik".	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	100%	100%	100%	100%	100	100%
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	35%	45%	65%	75%	75%	75%

2	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai Lakip SKPD	C	B	BB	A	A	A
3	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Antar Instansi Dan Lembaga Lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru.	Meningkatnya Jumlah Website OPD yang terintegrasi dengan Portal Pekanbaru	35%	45%	65%	80%	85%	85%
		Jumlah advertorial yang diterbitkan melalui kemitraan media cetak dan elektronik	65%	70%	80%	85%	90%	90%
4	Sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah	35%	55%	70%	83%	90%	90%
5	Jumlah data sektoral yang tersedia, up to date (6 bulan terakhir)	Jumlah data sektoral yang tersedia, up to date (6 bulan terakhir)	45%	55%	75%	85%	90%	90%

BAB VII

TABEL 7.1 PERUBAHAN

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kerja Pada Akhir RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir
						Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	Target
	MISI 3 : Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik											
		Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelola dan Infrastruktur Kota Cerdas										
				Persentase Pertumbuhan Infrastruktur								
			Sasaran 6 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance & Clean Governance)	1. Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			40	50	60	80	100	100
				2. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)			60,04	65,7	70,06	71,05	71,25	71,25

TABEL 7.2. PERUBAHAN

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja 2016	TAHUN					Target Kinerja Akhir Tahun 2022
				2018	2019	2020	2021	2022	
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.10.1	Areal Traffic Control System (ATCS) Dan City Surveillance	%	N/A	Masterplan	10% Coverage	15% Coverage	20% Coverage	25% Coverage	25% Coverage
2.10.2	Web site Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.10.3	Persentase aplikasi yang terintegrasi antar instansi dan lembaga lingkup pemerintah kota Pekanbaru	%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
2.10.4	Persentase permintaan informasi publik yang ditindak lanjuti	%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.5	Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
2.14	STATISTIK								
2.14.1	Buku Pekanbaru Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.14.2	Buku PDRB Kota Pekanbaru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 ini berpedoman pada RPJMD Kota Pekanbaru yang memuat tentang Program, Kegiatan dan Kebijakan serta Tujuan dan Sasaran.

Renstra digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan juga sebagai pedoman penyusunan Renstra yang akan datang.

Selain itu Renstra dipakai sebagai bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta lima tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2017-2022 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat mencapai target sasaran dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dan sekaligus juga bisa mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekanbaru.





